

KELENGKETAN BIAYA DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MILIK PEMERINTAH DAERAH

Oleh:

Erlyna¹⁾, Supatmi¹⁾

E-mail: patmie@staff.uksw.edu

¹⁾Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Satya Wacana Salatiga

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether sticky cost behavior occurs in the banking industry in Indonesia and whether government ownership can influence the level of sticky cost. Sticky cost occurs if there is a cost change when income increases more than the cost change when income decreases. The rural banks (Bank Perkreditan Rakyat - BPR) of Central Java are used as the object of this research with 159 banks taken for the sample. The data used in this research is regional government BPR financial reports from 2009-2012, which are obtained from the Bank of Indonesia official website. These research variables cover cost log as the dependent variable, and income log, income dummy log, and regional government BPR income dummy log as independent variables. A dual linear regression technique is used in this research.

These research results reveal that there is no sticky cost in regional government BPR. In spite of this, the research results confirm that the regency government-owned BPR have higher sticky cost behavior than provincial government-owned BPR.

Keywords: *Sticky cost, rural bank, regency government ownership.*

PENDAHULUAN

Dalam volume produksi, perilaku biaya dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang bersifat konstan secara total dengan rentang yang relevan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan, dimana biaya akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan aktivitas (Carter *et al*, 2006: 43). Akan tetapi terdapat biaya dimana peningkatan biayanya lebih tinggi saat volume aktivitas meningkat dibanding penurunan biaya saat volume aktivitas menurun, perilaku ini disebut sebagai biaya lengket (*sticky cost*).

Penelitian Anderson *et al* (2003) mengungkapkan bahwa biaya penjualan, biaya umum dan biaya administrasi menghasilkan respon yang berbeda terhadap perubahan kenaikan dan penurunan dalam aktivitas, hal ini disebut sebagai biaya lengket. Anderson *et al* (2003) juga menemukan bahwa biaya penjualan, umum, dan administrasi meningkat rata-rata 0,55% untuk setiap 1% kenaikan penjualan, tetapi menurun hanya 0,35% untuk penurunan

penjualan 1 %. Alasan adanya biaya lengket adalah ketidakpastian tentang permintaan masa depan dari produk perusahaan yang memimpin manajer untuk menunda pengurangan biaya sampai mereka yakin dengan penurunan volume. Namun penelitian Putri (2013) tidak menemukan adanya biaya lengket dalam perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah.

Timbulnya biaya lengket dapat berpengaruh terhadap penilaian manajer, analisis keuangan, calon investor, serta pemakai laporan keuangan lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan Weiss (2010) dalam Herliansyah *et al* (2010), menemukan bahwa perilaku biaya lengket dapat mengurangi tingkat akurasi dalam permalan laba akibat situasi ketidakpastian. Ditemukan bahwa peramalan laba para analis, secara absolut untuk perusahaan yang memiliki biaya lengket rata-rata 25% kurang akurat dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki perilaku biaya lengket.

Perilaku biaya lengket juga dapat disebabkan oleh hubungan kuat antara biaya dan isu-isu *governance*, salah satu isu *governance* yang dapat mempengaruhi kemunculan biaya lengket adalah kepemilikan negara. Budiwiyono (2011), mengatakan bahwa kepemilikan pemerintah dan intervensi pemerintah terhadap perbankan berpengaruh buruk terhadap kinerja perbankan, intervensi pemerintah di Bank BUMN terjadi dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Kegiatan yang sering diintervensi oleh pemerintah ialah perekrutan karyawan, penentuan komisaris dan direksi, pengadaan barang dan jasa serta penyaluran kredit. Intervensi menyebabkan manajemen bank tidak berjalan dengan baik, karena merusak gaya kepemimpinan dan budaya kerja sehingga dapat mempengaruhi kesehatan kinerja bank itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kelengketan biaya terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda), serta apakah kepemilikan pemda yang dipisah antara pemda kabupaten dan provinsi memiliki tingkat kelengketan biaya berbeda. BPR kabupaten yang berada dalam taraf yang lebih rendah dibandingkan dengan BPR provinsi sehingga pemerintah lebih leluasa untuk melakukan intervensinya kepada BPR kabupaten, hal ini akan memperkuat dugaan tingkat kelengketan biaya (*sticky cost*) akan lebih tinggi pada BPR kabupaten. Penelitian ini mereplikasi penelitian Anderson *et al* (2003) dengan objek penelitian BPR yang dimiliki pemerintah daerah di Jawa Tengah, serta menguji perilaku biaya lengket pada biaya administrasi dan umum, personalia, dan biaya operasional lainnya pada BPR dimana variabel tersebut berhubungan secara langsung dengan volume aktivitas BPR.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan biaya administrasi dan umum, personalia, dan biaya operasional lainnya di BPR milik pemda dimana biaya tidak selalu berubah secara proporsional. Selain itu juga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan intervensinya di BPR, karena intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi BPR pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penambahan literatur terkait kelengketan biaya pada perusahaan milik pemerintah.

KAJIAN TEORI

Kelengketan Biaya Pada Perusahaan Milik Pemerintah

Biaya lengket timbul dari perilaku biaya di mana biaya mudah untuk ditambahkan tetapi sulit untuk diturunkan. Perilaku biaya yang tidak proporsional dalam menanggapi perubahan aktivitas telah dibahas dan didokumentasikan oleh beberapa artikel. Subramaniam dan Weidenmier (2003) menemukan bahwa total biaya meningkat 0,93% per kenaikan 1% pada pendapatan, tetapi turun sebesar 0,85% per penurunan 1%. Perilaku ini disebut sebagai biaya lengket dimana kenaikan biaya lebih besar dibandingkan dengan penurunannya pada perubahan volume aktivitas pada jumlah yang ekuivalen.

Perilaku biaya lengket dapat disebabkan oleh hubungan antar biaya dan aktivitas. Pengurangan biaya dalam menanggapi pengurangan aktivitas tergantung pada kemampuan manajemen untuk mengurangi biaya kapasitas yang tidak terpakai. Tidak semua biaya dikatakan sebagai biaya lengket dan penyebab utama adanya biaya lengket adalah ketidakpastian mengenai permintaan di masa depan dari produk perusahaan sehingga membuat manajer untuk memperhitungkan penundaan pengurangan biaya sampai perusahaan yakin dengan penurunan volume. Menurut Subramaniam dan Weidenmier (2003) pada saat aktivitas perusahaan meningkat akan mengakibatkan peningkatan biaya secara langsung, tetapi pada saat perusahaan mengalami penurunan aktivitas perusahaan tidak dapat secara langsung mengurangi aset, karyawan, dan biaya lainnya dalam jangka pendek. Manajer perusahaan beranggapan bahwa penurunan aktivitas bersifat sementara. Manajer memiliki keyakinan bahwa aktivitas akan kembali normal, sehingga manajer melakukan penundaan dalam hal pengurangan biaya saat penurunan aktivitas.

Porporato dan Werbin (2010) mengatakan bahwa biaya lengket adalah biaya yang dapat dengan mudah ditingkatkan pada saat terjadi peningkatan permintaan produk perusahaan, tetapi tidak turun seiring dengan penurunan permintaan produk. Penelitian Porporato dan Werbin (2010) pada perusahaan perbankan di negara Brasil, Argentina, dan Kanada menunjukkan adanya perbedaan tingkat kelengketan biaya pada masing-masing negara karena adanya perbedaan struktur biaya dan kondisi ekonomi pada masing-masing negara, dimana bank yang beroperasi di lingkungan ekonomi yang tidak menentu seperti Argentina menunjukkan penurunan biaya yang paling rendah pada saat terjadi penurunan pendapatan. Kelengketan biaya juga dapat mempengaruhi laba pada perusahaan, pada penelitian yang dilakukan Yudhi *et al* (2010) perusahaan yang memiliki biaya lengket yang lebih besar akan memperlihatkan penurunan laba yang lebih besar ketika level aktifitas menurun dibandingkan dengan perusahaan yang biaya lengketnya lebih kecil, hal ini dikarenakan biaya lengket yang tinggi dihasilkan dari penyesuaian biaya yang lebih sedikit ketika level aktivitas menurun, karena itu penghematan biaya lebih sedikit.

Isu-isu tata kelola pemerintahan juga dapat menjelaskan perilaku biaya lengket. Calleja *et al* (2006) menemukan bahwa perusahaan di negara Jerman dan Perancis menunjukkan biaya lengket yang lebih besar dari pada biaya lengket pada perusahaan di Inggris dan Amerika Serikat, mereka menduga bahwa kode sistem hukum pada perusahaan di negara Jerman dan Perancis tidak hanya membuat perusahaan menekankan pada kepentingan pemegang saham tetapi juga pemangku kepentingan lain termasuk karyawan. Karyawan memiliki posisi yang lebih kuat dalam tata kelola perusahaan, sehingga lebih sulit bagi perusahaan untuk memberhentikan karyawan ketika penurunan pendapatan. Ketatnya undang-undang perlindungan ketenagakerjaan juga dapat menyebabkan munculnya biaya lengket.

Karena sulit bagi perusahaan untuk mem-PHK karyawannya disaat penurunan aktivitas perusahaan. Sedangkan pada perusahaan yang terdapat di Inggris dan Amerika Serikat manajemen perusahaan dibawah tekanan pihak eksternal seperti pemegang saham, sehingga perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan dilakukan demi kepentingan pemegang saham. Saat terjadi penurunan aktifitas perusahaan jauh lebih mudah untuk mengurangi sumber daya mereka.

Biaya lengket juga ditemukan pada bidang kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah. Balakrishnan dan Soderstrom (2008) meneliti pengaruh kepemilikan terhadap perilaku biaya, dimana menemukan bahwa rumah sakit milik pemerintah menunjukkan adanya kelengketan biaya. Diduga bahwa rumah sakit milik pemerintah mengalami kendala dalam keuangan, mereka juga harus melalui proses birokrasi dan mekanisme politis yang rumit untuk memperoleh tambahan dana dari lembaga pemerintah. Karena terdapat ketidakpastian atau lambannya mengenai tambahan dana dari lembaga pemerintah membuat manajer rumah sakit lebih memilih untuk mempertahankan sumber daya mereka karena untuk menghindari adanya biaya penyesuaian saat aktivitas menurun.

Penelitian Anderson *et al* (2003) menggunakan variabel biaya penjualan, umum, dan administrasi dalam memperhitungkan biaya lengket, karena biaya penjualan, umum, dan administrasi merupakan biaya yang aktivitas penggerakannya adalah volume penjualan. Untuk menguji adanya biaya lengket Anderson *et al* (2003) membandingkan variasi biaya penjualan, umum, dan administrasi terhadap penjualan di periode dimana terjadinya peningkatan penjualan dengan variasi biaya penjualan, umum, dan administrasi terhadap penjualan di periode terjadinya penurunan penjualan.

Objek penelitian ini adalah BPR pemerintah daerah yang terdapat di Jawa Tengah, peneliti menggunakan variabel biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya, karena variabel tersebut berhubungan secara langsung dengan volume aktivitas BPR. Untuk menguji kelengketan biaya dengan membandingkan variasi biaya administrasi dan umum, personalia dan operasional lainnya terhadap pendapatan di periode dimana terjadi peningkatan pendapatan dengan variasi biaya administrasi dan umum, personalia, operasional lainnya terhadap pendapatan di periode dimana terjadi penurunan pendapatan. Oleh karena itu rumusan hipotesisnya adalah :

H_1 : Besarnya kenaikan biaya administrasi dan umum, personalia dan operasional lainnya saat pendapatan naik lebih besar dibandingkan dengan besarnya penurunan biaya administrasi dan umum, personalia, operasional lainnya saat pendapatan menurun.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Daerah

Salah satu masalah pemerintahan yang dapat berpotensi mempengaruhi biaya lengket adalah kepemilikan negara. Keterlibatan pemerintahan dalam hal mencari keuntungan dari kegiatan telah didokumentasikan oleh beberapa artikel. Sapienza (2004) mengungkapkan bahwa perusahaan milik negara dikenakan biaya sosial, politik, dan biaya agensi. Kepemilikan pemerintah pada perbankan memiliki efek distorsi pada alokasi sumber daya, alokasi sumber daya yang dipolitisi ini mungkin akan berpengaruh pada perkembangan dan produktifitas perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri juga dijadikan sebagai mekanisme untuk mengejar tujuan para politisi, seperti memaksimalkan pekerjaan atau pembiayaan perusahaan yang diinginkan para politisi saja untuk mengejar keuntungan pribadi dan dalam rangka mencapai tujuan politik mereka, politisi sering memberikan perintah kepada manajer

BUMN untuk mentransfer sumber daya BUMN kepada konstituen mereka (Shleifer dan Vishny,1994). Boardman dan Vining (1989) berpendapat bahwa dari pandangan teori hak kepemilikan, dimana sebagai wakil dari pemegang saham mempunyai sedikit insentif untuk mengawasi manajer BUMN. Perusahaan yang dimiliki pemerintah berpotensi dikenakan biaya agensi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta. Selain itu, mekanisme pemantauan dan jalannya kegiatan di tingkat pemerintah kurang efektif sehingga menyebabkan politisi dan birokrat lebih berpotensi dalam melakukan intervensinya dengan mengorbankan kinerja perusahaan

Wang *et al* (2008) menemukan bahwa perusahaan yang dikuasai pemerintah lokal seperti provinsi dan kabupaten lebih memilih untuk menyewa auditor lokal, hal ini dilakukan karena untuk alasan yang menguntungkan (Pemerintah dapat mengintervensi pekerjaan auditor agar auditor dapat memberikan pendapat yang menguntungkan). Pemerintah menggunakan tekanan politik memaksa auditor lokal untuk berkolusi dengan mereka. Dengan kata lain, Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan auditor lokal untuk menutupi kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang relatif buruk. Selain itu, saat ini banyak perusahaan daerah yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambatnya pemerintah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Pemerintah juga sering melakukan eksploitatif terhadap perusahaan daerah dengan menargetkan penerimaan APBD dari perusahaan daerah tanpa melihat perusahaan daerah tersebut mengalami untung atau rugi (Yulianto, 2000).

Pada BPR milik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten diduga terdapat perbedaan dalam hal intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dimana karena BPR kabupaten berada dalam taraf yang lebih rendah dibandingkan dengan BPR provinsi sehingga pemerintah lebih leluasa untuk melakukan intervensinya kepada BPR kabupaten. Menurut Penowo (2011) intervensi yang dilakukan pemerintah di BPR kabupaten seperti menyalurkan kredit ke pegawai negeri sipil (PNS) ataupun anggota DPRD, serta menjadikan BPR milik kabupaten sebagai alat untuk membiayai proyek besar pemerintah. Jika pemerintah turut terjun dalam aktivitas BPR, dalam hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan BPR milik kabupaten itu sendiri. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja BPR kabupaten. BPR dapat menderita kerugian jika dikelola secara tidak efisien dan produktifitas yang rendah sehingga membuat BPR tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya.

Biaya operasional pada BPR kabupaten diduga menimbulkan biaya lengket. Karena adanya perbedaan kepemilikan pemerintah pada kedua BPR tentunya akan ada perbedaan campur tangan ataupun intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BPR kabupaten. Ketika pendapatan meningkat, BPR milik pemerintah kabupaten cenderung akan meningkatkan biaya operasional seperti biaya untuk merekrut karyawan baru, meningkatkan kapasitas karyawan (memberikan *training*), biaya untuk memperoleh barang, ataupun biaya yang digunakan untuk membiayai proyek pemerintah. Tetapi ketika pendapatan menurun, sangat sulit bagi BPR milik pemerintah kabupaten untuk menurunkan sumber daya mereka (terutama karyawan) karena tekanan sosial dan politik yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tingkat kelengketan biaya. Maka rumusan hipotesisnya adalah :

H₂ : Tingkat kelengketan biaya semakin tinggi pada BPR milik pemerintah kabupaten dibandingkan dengan BPR milik pemerintah provinsi.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah BPR pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2009-2012. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang harus dipenuhi yaitu BPR tersebut milik pemerintah kabupaten atau milik pemerintah provinsi dan BPR yang memiliki biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya dalam laporan keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut maka berikut ini pengambilan sampel penelitian:

Tabel 1. Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Data
1	BPR Pemerintah Daerah di Jawa Tengah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2009-2012	189
2	BPR Pemerintah Daerah di Jawa Tengah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2009-2012	(30)
Jumlah sampel yang digunakan		159

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Data ini berupa data time series yang menggunakan data laporan keuangan tahunan BPR Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah untuk laporan tahunan 2009-2012 pada periode akhir Desember. Data-data tersebut diperoleh dari alamat *website* Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/>)

Untuk menjawab pertanyaan pertama dengan menggunakan persamaan dasar yang dikembangkan oleh Anderson *et al* (2003) untuk mendeteksi adanya biaya lengket adalah sebagai berikut :

Model 1:

$$\log \left[\frac{\text{biaya operasi}_{i,t}}{\text{biaya operasi}_{i,t-1}} \right] = \beta_0 + \beta_1 \log \left[\frac{\text{pendapatan}_{i,t}}{\text{pendapatan}_{i,t-1}} \right] + \beta_2 * \text{Dummy}_{\text{penurunan}} * \log \left[\frac{\text{pendapatan}_{i,t}}{\text{pendapatan}_{i,t-1}} \right] + \epsilon_{i,t}$$

Fungsi logaritma pada model adalah untuk memisahkan antara peningkatan biaya dan pendapatan dengan penurunan biaya dan pendapatan, dimana jika terjadi peningkatan biaya dan pendapatan akan menghasilkan nilai positif pada log biaya dan log pendapatan. Kemudian akan bernilai negatif pada log biaya dan log pendapatan jika terjadi penurunan biaya dan pendapatan.

Nilai *Dummy*_{penurunan} adalah 1 jika pendapatan mengalami penurunan dan akan bernilai 0 jika pendapatan mengalami peningkatan selama tiga periode yaitu dari tahun 2009-2010, 2010-2011 dan 2011-2012. Koefisien β_1 untuk mengukur persentase kenaikan biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya akibat kenaikan pendapatan sebesar 1 persen, sedangkan penjumlahan koefisien $\beta_1 + \beta_2$ untuk mengukur persentase kenaikan biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya akibat penurunan

pendapatan sebesar 1 persen. Hipotesis pertama diterima jika nilai koefisien $\beta_1 > 0$ dan $\beta_2 < 0$ dan kedua koefisien tersebut signifikan.

Untuk mengukur perbedaan tingkat kelengketan biaya pada masing-masing BPR variabel pembanding yang digunakan adalah BPR yang dimiliki kabupaten dan BPR provinsi. Oleh karena itu ,modelnya akan menjadi :

Model 2:

$$\begin{aligned} \log \left[\frac{\text{biaya operasi}_{i,t}}{\text{biaya operasi}_{i,t-1}} \right] &= \beta_0 + \beta_1 \log \left[\frac{\text{pendapatan}_{i,t}}{\text{pendapatan}_{i,t-1}} \right] + \beta_2 * \text{penurunan_dummy} \\ &* \log \left[\frac{\text{pendapatan}_{i,t}}{\text{pendapatan}_{i,t-1}} \right] + \beta_3 \\ &* \text{penurunan_dummy} * \log \left[\frac{\text{pendapatan}_{i,t}}{\text{pendapatan}_{i,t-1}} \right] * \text{DummyBPRkabupaten} \\ &+ \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Nilai dummy PD BPR adalah 1 jika BPR tersebut milik kabupaten dan akan bernilai 0 jika BPR tersebut milik pemerintah provinsi. Penjumlahan koefisien $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$ merupakan presentase penurunan biaya administrasi dan umum, personalia dan operasional lainnya akibat penurunan pendapatan sebesar 1% dengan menambahkan variabel kepemilikan pemerintah pada BPR . Hipotesis kedua dapat diterima jika nilai koefisien $\beta_3 < 0$ dan signifikan.

Dari data yang terkumpul kemudian akan dipilih data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum masuk pada pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear berganda akan dilakukan statistik deskriptif dan beberapa uji asumsi klasik sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam analisis linear berganda. Uji asumsi klasik yang akan digunakan seperti uji multikolinearitas dengan menggunakan pendekatan *variance inflation factor* (VIF), Uji autokorelasi menggunakan uji *langrange multiplier*, uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan uji *park*, dan Uji normalitas residual dengan *kolmogorov smirnov*.

ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah penjelasan statistik deskriptif untuk pendapatan dan biaya operasional tahun 2009-2010 , 2010-2011 dan 2011-2012.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Keterangan	Jumlah sampel yang mengalami perubahan kenaikan	Jumlah sampel yang mengalami perubahan penurunan	Rata-rata (dalam ribuan rupiah)
2009-2010			
Pendapatan	44	9	1.587.089
Biaya Operasional	49	4	827.986
2010-2011			
Pendapatan	45	8	1.978.491
Biaya Operasional	40	13	861.460
2011-2012			
Pendapatan	44	9	2.141.522
Biaya Operasional	47	6	939.204

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tahun 2009-2010 rata-rata terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp 1.587.089.000,- dimana jumlah sampel yang mengalami kenaikan pendapatan sebanyak 44 sampel dan yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 9 sampel. Dengan demikian selama tahun 2009-2010 terjadi kenaikan pendapatan mencapai 83% dari total keseluruhan sampel. Sedangkan untuk perubahan biaya administrasi dan umum, personalia dan operasional lainnya selama tahun 2009-2010 mengalami rata-rata kenaikan biaya sebesar Rp 827.986.000,- ,dimana sebanyak 49 sampel mengalami kenaikan biaya dan 4 sampel mengalami penurunan biaya. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya sebanyak 92% dari total keseluruhan sampel. Dilihat dari presentase jumlah sampel yang mengalami kenaikan pendapatan dengan presentase jumlah sampel yang mengalami kenaikan biaya menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan ada kemungkinan diikuti oleh kenaikan biaya.

Pada tahun 2010-2011 kembali terjadi kenaikan pendapatan dibandingkan pada tahun 2009-2010 dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 1.978.491.000,- dimana sebanyak 45 sampel mengalami kenaikan pendapatan dan hanya 8 sampel yang mengalami penurunan pendapatan,dengan demikian selama tahun 2010-2011 terjadi peningkatan pendapatan sebanyak 85% dari total keseluruhan sampel. Sedangkan untuk biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya tahun 2010-2011 terjadi kenaikan biaya operasional sebesar Rp 861.460.000,- Jumlah sampel yang mengalami kenaikan biaya sebanyak 40 sampel dan yang mengalami penurunan biaya sebanyak 13 sampel, dengan demikian selama tahun 2010-2011 telah terjadi kenaikan biaya administrasi dan umum,personalia, dan operasional lainnya sebesar 75%.

Tahun 2011-2012 terjadi kenaikan pendapatan kembali dibandingkan tahun sebelumnya dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 2.141.522.000,-. Sebanyak 44 sampel

mengalami kenaikan pendapatan dan 9 sampel mengalami penurunan pendapatan, dengan demikian selama tahun 2011-2012 terjadi peningkatan pendapatan sebesar 83% dari total keseluruhan sampel. Sedangkan untuk biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya mengalami rata-rata kenaikan sebesar Rp 939.204.000,-. Sebanyak 47 sampel mengalami kenaikan dan 6 sampel mengalami penurunan biaya, sehingga selama tahun 2011-2012 terjadi kenaikan biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya sebesar 89%

Jika dilihat selama periode 2009-2010, 2010-2011, dan 2011-2012 lebih banyak jumlah sampel yang mengalami kenaikan pendapatan dan kenaikan biaya dibandingkan dengan jumlah sampel yang mengalami penurunan pendapatan dan biaya, jadi bisa dikatakan tidak terjadi kelengkengan biaya untuk tahun 2009-2010, 2010-2011, dan 2012-2013 karena biaya dikatakan lengket jika perubahan peningkatan biaya saat terjadi perubahan peningkatan pendapatan lebih besar dibandingkan perubahan biaya yang mengalami penurunan saat terjadi perubahan penurunan pendapatan.

Pengujian Hipotesis

Sebelum masuk pada pengujian hipotesis telah dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat terlebih dahulu dalam pengujian regresi linear berganda. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model telah lolos dalam uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji heteroskedasdisitas, dan uji autokorelasi. Untuk hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada halaman lampiran.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.020	0.005		4.496	0.000
log_pendapatan (β_1)	0.654	0.067	0.727	9.724	0.000
dummy_log_pendapatan (β_2)	-0.265	0.201	-0.099	-1.318	0.189

a. Dependent Variable: log_biaya_operasional

Sumber : Data diolah, 2013

Hasil pengujian untuk hipotesis pertama dapat dilihat di tabel 3. Nilai dari koefisien β_1 adalah 0,654 dimana untuk koefisien $\beta_1 > 0$ dan koefisien β_1 signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya administrasi dan umum, personalia dan biaya operasional lainnya meningkat sebesar 0,654% untuk setiap kenaikan pendapatan sebesar 1%. Sedangkan nilai koefisien untuk β_2 adalah -0,265 dimana $\beta_2 < 0$ sehingga kombinasi penjumlahan $\beta_1 + \beta_2$ menghasilkan nilai sebesar 0,389 (0,654 - 0,265). Nilai koefisien β_2 sendiri tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan variabel penurunan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel total biaya. Ketika terjadi kenaikan pendapatan, biaya mengalami peningkatan, namun saat pendapatan mengalami penurunan perilaku biaya tidak dapat disimpulkan karena hasil β_2 yang tidak signifikan. Kelengkengan biaya dapat terjadi jika koefisien β_2 bernilai negatif dan signifikan, dengan demikian hipotesis pertama tidak terbukti. Hal ini terjadi ada kemungkinan karena

pada periode 2009-2012 BPR mengalami perkembangan kinerja yang cukup baik terutama dalam menjaga kualitas kredit, sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh selama tahun 2009-2012 mengalami peningkatan.

Tabel 4. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Tahun	Jumlah kredit yang diberikan	<i>Non performing loan (NPL)</i>
2009	Rp 7.399.227.579	8.38%
2010	Rp 8.516.072.450	7.79%
2011	Rp 9.788.154.388	6.90%
2012	Rp 11.328.567.001	6.10%

Sumber : Data statistik BPR tahun 2009-2012

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh BPR semakin meningkat dari tahun 2009-2012 dan prosentase NPL dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan semakin baik kinerja BPR dan manajemen pengawasan kredit yang diterapkan oleh BPR. Kinerja BPR yang semakin membaik dari tahun 2009-2012 menyebabkan pendapatan mengalami peningkatan. Jumlah sampel yang mengalami peningkatan biaya dan pendapatan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang mengalami penurunan biaya dan pendapatan, sehingga membuat variabel penurunan biaya saat terjadi penurunan pendapatan tidak signifikan. Oleh sebab itu hipotesis pertama (H1) tidak dapat diterima.

Hal ini berarti bahwa biaya administrasi dan umum, personalia, dan operasional lainnya bukan merupakan biaya lengket (*sticky cost*) di BPR Pemerintah Daerah untuk wilayah Jawa Tengah pada periode 2009-2012. Tidak ditemukannya biaya lengket pada BPR pemerintah daerah hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Putri (2013) dimana peningkatan biaya saat terjadi peningkatan pendapatan hasilnya signifikan akan tetapi penurunan biaya saat terjadi penurunan pendapatan hasilnya tidak signifikan pada seluruh BPR (BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta) di Jawa Tengah.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.021	.004		4.617	.000
log_pendapatan (β_1)	.650	.066	.724	9.792	.000
dummy_log_pendapatan (β_2)	.213	.293	.079	.726	.469
dummybpr_dummylogpendapatan (β_3)	-.702	.317	-.218	-2.214	.028

a. Dependent Variable: log_biaya-operasional

Sumber : Data diolah, 2013

Hasil pengujian untuk hipotesis kedua ada pada tabel 5. Hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui tingkat kelengketan biaya yang semakin tinggi pada BPR milik kabupaten dengan menambahkan variabel kepemilikan pemerintah pada BPR. Koefisien β_1 bernilai positif 0,650 dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa biaya administrasi dan umum, personalia dan biaya operasional lainnya meningkat sebesar 0,650% untuk setiap kenaikan pendapatan sebesar 1%. Sedangkan koefisien β_2 bernilai positif 0,164 sehingga kombinasi penjumlahan $\beta_1 + \beta_2 = 0,863$. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan biaya yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya sehingga mengindikasikan terjadi anti *sticky costs*, akan tetapi koefisien β_2 sendiri tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Koefisien β_3 bernilai negatif dan signifikan menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah pada BPR dapat mempengaruhi perubahan biaya. Penjumlahan $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 0,161$ menunjukkan bahwa biaya administrasi, personalia dan biaya operasional lainnya mengalami penurunan sebesar 0,161 % ketika pendapatan menurun sebesar 1%.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan pemerintah pada BPR kabupaten dapat mempengaruhi perubahan biaya yang berdampak pada kelengketan biaya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BPR milik pemerintah kabupaten dan BPR milik pemerintah provinsi walaupun keduanya sama-sama milik pemerintah, dimana BPR milik kabupaten berada dalam taraf yang lebih rendah dibandingkan BPR milik provinsi sehingga membuat pemerintah lebih leluasa melakukan intervensinya terhadap BPR kabupaten.

Diterimanya hipotesis kedua juga karena jumlah sampel yang mengalami penurunan biaya saat terjadi penurunan pendapatan pada BPR milik pemerintah kabupaten lebih banyak dibandingkan jumlah sampel yang mengalami penurunan biaya saat terjadi penurunan pendapatan pada BPR milik pemerintah provinsi, sehingga mengakibatkan kelengketan biaya lebih tinggi pada BPR milik kabupaten.

Menurut pendapat Sapienza (2004) kepemilikan pemerintah pada perbankan memiliki efek distorsi pada alokasi sumber daya, alokasi sumber daya yang dipolitisi ini mungkin akan berpengaruh pada perkembangan dan produktifitas perusahaan. Sehingga pada saat pendapatan BPR milik kabupaten mengalami penurunan sulit bagi BPR untuk mengurangi sumber daya mereka karena adanya tekanan sosial dan politik yang dilakukan pemerintah terhadap BPR milik kabupaten. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis kedua dimana kelengketan biaya akan semakin tinggi pada BPR milik pemerintah kabupaten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa kelengketan biaya (*sticky cost*), yaitu untuk biaya administrasi dan umum, personalia, dan biaya operasional lainnya, tidak terjadi di BPR pemerintah daerah untuk wilayah Jawa Tengah. Namun ketika kepemilikan pemerintah daerah atas BPR dibedakan antara kepemilikan pemerintah kabupaten dan provinsi ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah pada BPR kabupaten berpengaruh terhadap perubahan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BPR milik kabupaten dan BPR milik provinsi berpengaruh terhadap tingkat kelengketan biaya di BPR pemerintah daerah untuk wilayah Jawa Tengah. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dihindari oleh BPR milik pemerintah, sehingga pengendaliannya hanya dapat dilakukan pada BPR milik kabupaten itu sendiri. Adanya biaya lengket pada BPR kabupaten dapat dijadikan evaluasi bagi BPR kabupaten dalam membuat perencanaan biaya administrasi dan umum, personalia dan operasional lainnya dengan lebih baik.

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya membandingkan BPR milik kabupaten dan BPR milik provinsi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan BPR milik swasta dan BPR milik pemerintah (tanpa melihat BPR tersebut milik pemerintah kabupaten/provinsi) untuk melihat intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kelengketan biaya di BPR pemerintah lebih tinggi dibandingkan BPR milik swasta. Yang kedua pada pengambilan sampel dilakukan pada periode penelitian yang relatif pendek dari tahun 2009-2012, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah waktu periode penelitian dengan metode *times series data* sehingga hasilnya diharapkan lebih relevan untuk melakukan pengujian kelengketan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Mark C., Rajiv D. Banker, dan Surya N. Janakiraman, 2003, Are Selling, General, and Administrative Costs “Sticky”? **Journal of Accounting Research Vol. 41 No. 1: 41-63.**
- Balakrishnan, Ramji and Naomi S. Soderstrom. 2008. Cross-Sectional Variation in Cost Stickiness Reaction. **Social Science Research Network Working Paper.**
- Bank Indonesia, 2012, Data statistik BPR konvensional, Jakarta, yang diunduh dari www.bi.go.id.
- Boardman, Anthony E. dan Aidan R. Vining, 1989, Ownership and Performance in Competitive Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed, and State-owned Enterprises. **Journal of Law and Economics, Vol. 32 (1): 1-33.**
- Budiwiyono, Eko, 2011, **Intervensi Pemerintah Sebabkan Bank Tidak Optimal**, diunduh dari <http://www.ugm.ac.id> pada tanggal 17 oktober 2012 pukul 21:05.
- Calleja, Kenneth, Michael Stelarios, and Dylan C. Thomas, 2006, A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. **Management Accounting Research Vol 17 : 127-140.**

- Carter dan Usry, 2006, **Cost accounting**, Salemba empat edisi 13, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi **Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19**. Universitas Diponegoro.
- Hakim, Deddy Budiman, 2011, **Dilema Kepemilikan BPR**, diunduh dari <http://www.infobanknews.com> pada tanggal 17 september 2012 pukul 7:53.
- Herliansyah, Yudhi, Wiwik Utami, Idi J. Hidayatullah, 2010, **Analisis Perilaku Sticky Cost dan Pengaruhnya Terhadap Prediksi Laba Menggunakan Model Cost Variability**. Working paper, yang diunduh dari <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id> tanggal 11 Januari 2012 pukul 19:52.
- Penowo, Andi, 2011, **Pemerintah Jangan Intervensi BPR Daerah**, diunduh dari <http://www.timlo.net> pada tanggal 11 september 2012 pukul 18:56.
- Porporato, Marcela and Eliana Werbin. 2010. Active Cost Management in Banks. Evidence of Sticky Costs in Argentina, Brazil, and Canada. **AAA 2011 Management Accounting Section Meeting Paper**.
- Putri, Stefany Triana, 2013, **Perilaku Kelengketan Biaya (Sticky Costs) pada Industri Perbankan di Jawa Tengah**. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Sapienza, Paola, 2004, The Effects of Government Ownership on Bank Lending. **Journal of Financial Economics Vol. 72: 357-384**.
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny, 1994, Politicians and Firms. **Quarterly Journal of Economics. Vol. 109 No. 4: 995-1025**.
- Subramaniam, C., Weidenmier, M., 2003. Additional evidence on the sticky behaviour of costs. **Working Paper, Texas Christian University**.
- Wang, Qian, T.J Wong, dan Lijun Xia, 2008, State ownership, The institutional environment, and auditor choice : Evidence from China. **Journal of Accounting and Economics. Vol. 46 : 112- 134**.
- Yulianto, Eko, 2000, BUMD: Potret Buram Perusahaan Daerah, diunduh dari <http://kskkp.tripod.com> pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 21:44.